

STRATEGI *MEDIA RELATIONS* DIVISI PENERANGAN SOSIAL BUDAYA (PENSOSBDUD) KBRI AUSTRALIA TERKAIT PEMBERITAAN KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM).

Oleh: Enggar Dwi Ammy JF (071015050) - B
Enggardwiammy@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi *media relations* yang dilakukan Divisi Penerangan Sosial Budaya (Pensosbud) KBRI Australia terkait pemberitaan kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagai humas (hubungan masyarakat), Pensosbud KBRI Australia melakukan kegiatan *media relations*. Strategi *media relations* yang dilakukan Pensosbud adalah *press statement*, *press release*, dan *press gathering*. Dalam melakukan strategi tersebut, Pensosbud memberikan informasi, konfirmasi, dan edukasi terhadap wartawan dan media massa Australia mengenai kasus OPM. Hal tersebut dilakukan agar citra Indonesia tetap baik di mata internasional. Selain itu, inti dari strategi yang dilakukan Pensosbud adalah membina *interpersonal relations* dengan wartawan. Dengan begitu akan terjalin hubungan *mutual benefit* diantara kedua pihak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, tipe penelitian deskriptif, dan menggunakan metode studi kasus. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan, serta dokumentasi.

Kata kunci: *media relations*, strategi *media relations*.

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas strategi *media relations* yang dilakukan Divisi Penerangan Sosial Budaya (Pensosbud) KBRI Australia terkait Pemberitaan kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM merupakan suatu organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam memperjuangkan kemerdekaannya OPM melakukan beberapa aktivitas untuk memperoleh dukungan publik internasional. Berikut contoh aktivitas yang dilakukan OPM dalam website (detik.com artikel berita yang berjudul 'Benny Wenda tokoh Pembebasan Papua Barat muncul berpidato di Australia') di berita tersebut disebutkan belakangan ini, OPM gencar mencari dukungan ke beberapa negara besar seperti Australia, Belanda, dan Inggris.

Misi OPM adalah mempropaganda masyarakat Internasional agar mendukung gerakan '*free west Papua*'. Berbagai cara ditempuh untuk memperoleh dukungan, salah satu contohnya adalah ketika perwakilan OPM, yaitu Benny Wenda, berpidato di acara Tedx Sydney 2013. Dalam pidatonya, Benny menceritakan bagaimana perjuangan hidupnya untuk mencari suaka karena di Papua Barat banyak terjadi

pelanggaran HAM, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat dan karena hal tersebut, Benny bersama anggota OPM lainnya berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Tidak hanya itu saja, kasus OPM juga diekspose di berbagai media massa Australia. Seperti contohnya adalah liputan dari ABC TV yang berjudul “*Rare look inside West Papua independence movement*”. Dalam liputan yang berdurasi 14 menit ini, pers ABC TV melakukan investigasi dengan cara menyamar sebagai turis, melakukan wawancara kepada masyarakat dan beberapa tokoh di Papua Barat, yang menyatakan bahwa mereka ingin melepaskan diri dari kewilayahan Indonesia dan ingin merdeka.

Tayangan tersebut menampilkan korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Kekerasan yang ditampilkan seperti pemukulan, penyiksaan, pembunuhan, dan pelanggaran HAM. Berita lainnya adalah mengenai kekerasan dan pembunuhan di Papua Barat yang diliput oleh koran *The Sydney Morning Herald* edisi 20 Juni 2012. Dalam artikel tersebut ada kutipan yang menyatakan “*Recently the situation in West Papua is like a war. There are more military and police on every corner looking and watching the local people. There is no freedom of life in West Papua,*”. Artikel dalam koran tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Papua Barat merasa hidup dalam penuh tekanan karena sering terjadinya kekerasan dan pembunuhan.

Adanya pemberitaan di media massa Australia mengenai kasus yang terjadi di Indonesia khususnya Papua Barat seperti contoh di atas, maka dapat membuat citra Indonesia buruk di mata Internasional. Karena menurut Rakhmat (2005) Citra terbentuk berdasarkan informasi yang kita terima. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Buat khalayak, informasi itu dapat membentuk, mempertahankan atau meredefinisikan citra.

Oleh karena itu, pemerintah dianggap tidak dapat melindungi serta mensejahterakan rakyatnya. Padahal belum tentu apa yang ditampilkan di media massa sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi di Papua Barat, bisa saja apa yang ditampilkan di media massa merupakan salah satu upaya propaganda OPM untuk menggalang dukungan masyarakat internasional. Oleh karena itu, perlunya strategi dari pemerintah Indonesia yang diwakili oleh KBRI Australia untuk memantau, memediasi, serta melakukan konfirmasi terkait isu dan kasus seperti ini, agar citra Indonesia kembali baik (positif).

Salah satu strategi yang dapat dilakukan KBRI adalah melakukan *media relations* kepada *stakeholder* eksternal, yaitu yang menjadi fokus dalam penelitian ini

adalah wartawan dan media massa. Karena dengan menyadari media massa mempunyai dampak yang besar dalam menyebarluaskan informasi, dan mempengaruhi opini publik, maka dari itu, penulis juga meneliti bagaimana Pensosbud menjalin hubungan komunikasi, memberikan informasi serta konfirmasi dengan pihak pers yang memberitakan terkait dengan Indonesia, khususnya adalah kasus OPM. Serta bagaimana strategi *media relations* yang dilakukan Pensosbud untuk menanggapi kasus OPM.

Seperti paparan lisan yang dilakukan oleh menteri luar negeri Republik Indonesia (menlu RI) DR.N. Hasan Wirajuda pada tanggal 19 Januari 2005, mengatakan bahwa:

saya perlu menekankan kembali pentingnya kemitraan antara Deplu dan kalangan media massa sebagaimana telah terjalin selama ini. Melalui kemitraan tersebut, kita telah mampu menampilkan keutuhan fakta dan kejernihan opini – yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi khususnya masalah-masalah internasional. Kemitraan dengan media massa merupakan bagian dari *format total diplomacy* yang menuntut adanya keterpaduan langkah dari seluruh komponen bangsa agar mampu mendorong pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang secara efektif mencapai sasaran-sasaran nasional.

(Sumber: <http://www.kbri-canberra.org.au>)

Berdasar pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa *media relations* dianggap penting dalam penyampaian informasi, kebijakan, maupun konfirmasi yang akan berdampak pada opini dan pencitraan sebuah institusi maupun sebuah negara. Oleh karena itu, hubungan baik dengan pers menjadi sesuatu hal yang vital di bidang kehumasan, agar memperkecil kemungkinan terjadinya *communication gap* antara pihak Pensosbud dengan stakeholdernya khususnya media massa dan pers.

PEMBAHASAN

Strategi *media relations* yang dilakukan Divisi Penerangan Sosial Budaya (Pensosbud) KBRI Australia terkait pemberitaan kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilakukan penulis dengan cara melakukan mengumpulkan data dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada *Counsellor* Pensosbud dan staf Pensosbud yang kemudian hasil wawancara dengan narasumber tersebut dinarasikan, penulis juga melakukan pengamatan, serta dokumentasi dari hasil kegiatan *media relations* yang dilakukan.

Berdasar hasil wawancara, Pensosbud melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Oppurtunity, Threat*). Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang yang dimiliki Pensosbud. Serta ancaman apa yang akan

dihadapi oleh Pensosbud dalam melakukan kegiatan *media relations*.

Stregth (Kekuatan) yang dimiliki Pensosbud dalam melakukan *media relations* adalah adanya keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, komentar, serta klarifikasi yang diberikan oleh wartawan. Pensosbud yang berperan sebagai humas Internasional dan juga berperan sebagai humas pemerintah, mempunyai tugas untuk memberikan informasi yang terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia untuk disebarluaskan ke media massa dan masyarakat Australia. Hal tersebut dilakukan untuk menjalankan misi pemerintah Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi, dimana adanya transparansi informasi dan masyarakat berhak untuk mengetahui mengenai kebijakan pemerintah. Dengan Pensosbud memberikan informasi dan klarifikasi ke wartawan, maka Pensosbud membantu kinerja wartawan untuk memperoleh informasi terkait dengan Indonesia, dengan begitu Pensosbud menjalin hubungan baik dengan para wartawan, karena adanya *mutual benefit* (saling menguntungkan) di kedua pihak.

Kemudian, *weakness* (kelemahan) yang dimiliki oleh Pensosbud adalah tidak semua informasi mengenai Indonesia dapat disebarluaskan di media massa. Terutama mengenai isu-isu sensitif seperti contohnya kasus Papua. Hal ini dilakukan untuk tidak memperpanjang masalah yang ada. Terkadang ada kalanya KBRI tidak memberikan komentar mengenai sesuatu kasus tertentu untuk tidak memperburuk keadaan. Tetapi Pensosbud akan memberikan informasi serta klarifikasi jika memang isu yang berkembang perlu 'diluruskan'. Hal ini tergantung dari urgensi dari suatu masalah yang ada. Namun, istilah *no comment* ini yang seringkali mengakibatkan adanya salah paham antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang minim akan informasi terkait dengan kasus tertentu.

Oppurtunity (kesempatan) yang dimiliki Pensosbud dengan melakukan kegiatan *media relations* adalah berkurangnya pemberitaan negatif di media massa, karena adanya hubungan yang baik antara pihak Pensosbud dengan para wartawan. Sehingga wartawan akan melakukan klarifikasi kebenaran atau menanyakan suatu isu ke Pensosbud ataupun sebaliknya.

Selanjutnya *Threat* (ancaman) yang dapat terjadi oleh Pensosbud adalah adanya penyebaran informasi dan klarifikasi yang tidak merata, karena jenis kegiatan *media relations* yang dilakukan hanya beberapa saja, yaitu: *press statement*, *press release*, dan *press gathering*. Faktor lain yang dapat menghambat *media relations* adalah karena adanya perbedaan bahasa, budaya, pendidikan, situasi politik dan lain

sebagainya. Oleh karena itu, Pensosbud sebagai humas internasional mempunyai tantangan tersendiri dalam berkomunikasi, menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal, salah satunya adalah media massa Australia untuk memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah, kepentingan nasional dan konfirmasi dengan segala perbedaan yang dapat menghambat terjalannya *media relations* yang maksimal. Berdasar hasil analisis SWOT diatas, Pensosbud dapat mempertimbangkan strategi dan program selanjutnya, sehingga diharapkan strateginya akan lebih efisien.

Selain itu, Pensosbud memiliki tahapan proses kerja sebelum melakukan suatu strategi dan program kerja. Hal ini sesuai dengan teori dari Yosol Iriantara (2005:33), yang membahas proses kerja humas meliputi beberapa tahap, seperti:

1. Pengumpulan fakta: Pengumpulan fakta dapat dilakukan dengan penelitian, menganalisis pemberitaan media atau membaca kecenderungan (*trend analysis*).
2. Merumuskan permasalahan: Berdasarkan pada rumusan masalah, hasil penelitian atau kajian, kemudian dibuat strategi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik.
3. Perencanaan dan penyusunan program: Dalam tahap ini humas harus mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga mampu mempengaruhi sikap publiknya yang mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
4. *Evaluating*: Pada tahap ini, humas melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dari perencanaan, pelaksanaan program, pengkomunikasian, sampai keberhasilan atau kegagalan yang terjadi dari program tersebut berlangsung.

Pensosbud dalam melakukan *media relations* melakukan beberapa tahapan, yaitu: tahap pengumpulan fakta, perencanaan dan penyusunan program, serta melakukan evaluasi dari program yang sudah dijalankan. Hal ini menjadi sesuatu yang unik untuk diteliti, karena dengan melakukan hanya beberapa tahapan konsep diatas, *media relations* tetap berjalan dengan baik. Alasan yang diberikan dari pihak Pensosbud terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

“Biasanya setiap hari kita melakukan *media monitoring*, dengan membaca beberapa koran Australia..dari situ kita cari ada berita tentang Indonesia atau tidak, kalau ada kita melakukan *resume* dan berita tersebut di kliping untuk data. Itu salah satu cara pengumpulan data kita, nah kalau misal nih ada yang butuh di komentari dari salah

satu berita di koran, kita akan mengirim surat resmi ke koran tersebut yang nantinya akan diterbitkan di koran. Biasanya berupa konfirmasi atau tanggapan dari KBRI atau Duta Besar yang diwakili oleh juru bicara. Itu salah satu perencanaan dan penyusunan program kita. Lalu setelah itu kita melakukan evaluasi secara informal” (Pramono, 28 Oktober 2013).

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa Pensosbud melakukan *media monitoring* dengan membaca beberapa koran Australia seperti: *The Morning Sydney Herald*, *The Age*, *Canberra Times*, *The Australian*, dan *The Daily Telegraph*. Jika ada pemberitaan mengenai Indonesia, maka staf Pensosbud mengkliping dan melakukan *resume* untuk dikirimkan ke Kementerian Luar Negeri (KEMLU) sebagai laporan. Dan sesekali jika ada isu yang perlu dikomentari, maka KEMLU dan pemerintah Indonesia memerintahkan Duta Besar Indonesia di Australia untuk memberikan klarifikasi ke media massa agar citra Indonesia kembali baik.

Seperti yang sudah disebutkan, jenis kegiatan *media relations* yang dilakukan Pensosbud KBRI Australia terkait kasus OPM adalah *press statement*, *press release*, dan *press gathering*. Melakukan ketiga jenis kegiatan diatas, Pensosbud mengharapkan adanya hubungan *mutual benefit* antara pihak KBRI dengan media massa Australia. *Mutual benefit* yang dimaksudkan adalah adanya hubungan yang saling membutuhkan, jadi tidak hanya Pensosbud yang membutuhkan media massa untuk menyampaikan informasi, konfirmasi, tetapi media massa juga membutuhkan informasi yang mempunyai kredibilitas, faktual, dan akurat untuk beritanya, sehingga media massa juga penting membina hubungan baik dengan Pensosbud. Dengan begitu, Pensosbud dan media massa diposisikan setara. Hal diatas sejalan dengan pernyataan dari (Rudy 2005, p.09) yang menyatakan bahwa *media relations* tidak hanya terkait dengan kepentingan sepihak, organisasi saja atau media massa saja, melainkan kedua pihak memiliki kepentingan yang sama. Dengan demikian, akan membuat hubungan kerjasama menjadi *win-win solution*.

Menurut Pensosbud, inti dari *media relations* adalah *people to people relations*, karena dengan adanya hubungan kerabat antara Pensosbud dengan media massa, maka komunikasi yang terjalin tidak lagi menggunakan bahasa formal, melainkan menggunakan bahasa informal. Hubungan interpersonal dengan wartawan dapat membantu mengubah pandangan awak media terhadap organisasi. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta target kinerja KBRI. Karena pentingnya mendapatkan dukungan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi efektivitas politik luar negeri Indonesia dalam

memperkuat posisi Indonesia di tatanan internasional. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Iriantara (2005, p.15) ada kalanya hubungan interpersonal dengan awak media memberikan ruang untuk menunjang tujuan organisasi. Persahabatan atau hubungan interpersonal yang baik akan membantu mengubah pandangan awak media terhadap organisasi.

Pelaksanaan kegiatan *media relations* oleh Pensosbud menggunakan beberapa media untuk memberikan informasi dan klarifikasi, Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Yosol Iriantara (2005, p.29) yang menyatakan bahwa *media relations* berkenaan dengan media komunikasi. Media komunikasi diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien dalam berkomunikasi dengan publik. Tujuan dari melakukan *media relations* adalah untuk keberhasilan suatu program instansi. Selain itu, *media relations* pada dasarnya berkenaan dengan pemberian informasi atau memberikan tanggapan pada media atas nama instansi.

Salah satu media komunikasi yang digunakan Pensosbud adalah media online, yaitu situs (*website*) KBRI, email, dan beberapa media sosial. Namun yang menjadi masalah adalah ketika penyampaian informasi dan klarifikasi dilakukan melalui media online, dan tidak semua kalangan masyarakat dapat menggunakan teknologi internet, maka upaya untuk memberikan informasi dan klarifikasi mengenai hal yang krusial akan menjadi kurang efektif. Berdasar hasil wawancara dan pengamatan penulis, Pensosbud akan memberikan informasi dan klarifikasi ketika adanya pemberitaan mengenai Indonesia khususnya kasus OPM yang sudah menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Pensosbud juga melakukan teguran secara lisan ataupun tertulis kepada wartawan dan media massa Australia, yang tujuannya agar tidak lagi terjadi hal serupa dan agar jera.

Namun masih saja ada pemberitaan yang melebih-lebihkan keadaan dan masalah mengenai Indonesia, khususnya kasus Papua. Tindakan atau teguran yang diambil KBRI biasanya seperti: menerbitkan *press release* yang diunggah (*upload*) di website KBRI Canberra, mengirimkan dan mempublikasikan surat teguran ke media massa yang memberitakan Indonesia secara sensif dan memberikan *statement* mengenai informasi yang sebenarnya. Salah satu contoh teguran yang telah dilakukan oleh Pensosbud, adalah ketika ABC TV meyiarkan berita mengenai OPM yang dinilai melebih-lebihkan, dan sumber data yang digunakan tidak mempunyai kredibilitas. Teguran yang diberikan Pensosbud pada saat itu adalah secara lisan (telepon) dan tertulis yaitu melalui *press release* yang diterbitkan di website KBRI Australia.

Adanya pemberitaan negatif mengenai OPM, seperti contoh yang sudah disebutkan diatas dapat terjadi karena Pensosbud dan KBRI tidak memberikan semua informasi dan tidak selalu menanggapi apa yang dilakukan oleh OPM. Karena pada dasarnya OPM menginginkan perhatian serta dukungan dari masyarakat internasional, termasuk Australia untuk mendukung *free west Papua*. Sehingga menurut Pensosbud, semakin menanggapi setiap pernyataan dari OPM, maka akan membuat masalah semakin besar. Oleh karena itu, Pensosbud akan menanggapi suatu pemberitaan jika benar-benar isu yang ada harus ‘diluruskan’ atau diklarifikasi. Dan tentunya dilihat juga dari seberapa besar urgensinya permasalahan yang terjadi.

Maka dari itu pentingnya mempunyai relasi dengan wartawan, agar wartawan dalam memberitakan Indonesia khususnya Papua dapat berimbang dan sesuai dengan kenyataan. Tidak dipungkiri juga bahwa adanya wartawan yang mendukung (pro) dengan OPM, sehingga dalam memberitakan kasus OPM, narasumber yang digunakan berasal dari anggota OPM yang tentu saja mempunyai *agenda setting* dan tidak objektif dalam memberikan informasi. Sementara itu, pernyataan dari Abdullah Aceng (2000) yang menyatakan, dalam penulisan berita, wartawan pun selalu dituntut untuk membuat pemberitaan yang objektif, dan walaupun ada pemberitaan kasus, wartawan diwajibkan untuk membuat berita secara *balance* atau seimbang.

Oleh karena itu, Pensosbud berusaha untuk selalu memberikan *feedback* yang berupa informasi dan data kepada para wartawan ketika ada yang menanyakan kasus OPM. Dengan adanya keterbukaan dalam memberikan informasi dan data yang akurat diharapkan wartawan dan media massa tidak lagi mencari informasi dari narasumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak dipungkiri bahwa kasus terkait Papua mempunyai nilai berita tersendiri bagi wartawan nasional maupun wartawan internasional. Terlebih lagi, kasus Papua yang sudah bergulir cukup lama, yaitu 50 tahun dan sampai saat ini, OPM terus berusaha untuk mempropaganda masyarakat dunia agar mendukung “*free West Papua*”. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dari pemerintah Indonesia yang seharusnya tidak hanya meredam pemberitaan di media massa, tetapi juga dapat menyelesaikan kasus ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pengertian, perhatian, dan juga melakukan pendekatan ke masyarakat Papua secara berkelanjutan agar mengurangi adanya *communication gap*. Lalu dibantu dengan menjalankan *media relations* secara aktif, dalam arti memberikan informasi dan bukti mengenai upaya pemerintah Indonesia yang melakukan pendekatan secara

kesejahteraan, ekonomi dan demokrasi. Lalu, upaya pendekatan tersebut dimuat di media massa, agar masyarakat internasional dapat mengerti dan memahami upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan masalah ini.

Meski jenis kegiatan *media relations* yang dilakukan hanya *press statement*, *press release*, dan *press gathering*, tetapi menurut Pensosbud sudah dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan wartawan untuk disebarluaskan ke publiknya, Pensosbud dengan melakukan tiga kegiatan diatas dapat memberikan edukasi dan klarifikasi, membangun citra positif, dan menjalin hubungan baik dengan wartawan. Pensosbud juga lebih mementingkan kualitas dari kegiatan yang dijalankan dibandingkan kuantitas jenis kegiatan *media relations*. Dengan adanya hubungan baik yang dimiliki Pensosbud dengan wartawan, maka akan mempermudah komunikasi yang akan dilaksanakan.

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah sebagai berikut, Pensosbud melaksanakan tugasnya sebagai humas, melakukan beberapa kegiatan, salah satunya *media relations*. Inti dari *media relations* adalah *people to people relations*, sehingga Pensosbud berkepentingan untuk mengenal dan mempunyai hubungan baik dengan wartawan dan media massa di Australia. *People to people relations* dapat dilakukan dengan cara membangun hubungan interpersonal dengan para wartawan.

Selain itu, *media relations* yang dilakukan pensosbud adalah *press statement*, *press release*, dan juga *press gathering*. Meskipun hanya tiga jenis kegiatan, namun Pensosbud tetap bisa menjalankan *media relations* dengan baik. Hal ini dibuktikan dari adanya hubungan intens antara wartawan dengan Pensosbud, dimana Pensosbud berusaha untuk melibatkan wartawan dan media Australia ketika KBRI sedang melakukan sebuah acara baik formal dan infomal.

Untuk menciptakan citra positif tidak dapat dilakukan dengan cara yang instan, maka dari itu dibutuhkan proses. Salah satu proses untuk meningkatkan citra positif KBRI dan Indonesia di masyarakat Australia adalah dengan cara melakukan *media relations*. Dalam melakukan kegiatan *media relations* terdapat strategi khusus yang digunakan Pensosbud, berikut detailnya:

1. Meredam pemberitaan yang ada. Cara yang dilakukan Pensosbud ialah tidak selalu menanggapi OPM. Hal ini dilakukan agar KBRI dan pemerintah Indonesia terkesan tidak terbawa *agenda setting* OPM. Pensosbud akan

- memberikan klarifikasi dan juga teguran ke wartawan ataupun media massa ketika pemberitaan yang ada sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan berlebihan, sehingga menimbulkan citra negatif.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wartawan dan media Australia. Pensosbud dalam memberikan informasi dan klarifikasi mengenai Papua dan OPM didukung dengan adanya data, sehingga informasi dan klarifikasi yang diberikan mempunyai kredibilitas tinggi.
 3. Menjalin hubungan baik dengan wartawan dan media Australia, menjadi penting bagi Pensosbud untuk menyampaikan informasi dan klarifikasi jika ada isu yang terkait dengan Indonesia. Pensosbud memanfaatkan hubungan baik ini untuk memberikan edukasi kepada wartawan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan kasus Papua. Dengan begitu, diharapkan persepsi wartawan mengenai Indonesia dapat berubah menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Rudy May Teuku, 2005, *Komunikasi dan Humas Internasional*, Refika Adhitama, Bandung.
- Irintara Yosol, 2005, *Media Relations Konsep, Pendekatan, dan Praktik*, Simbiosis Rekayasa Media, Bandung.
- Kriyanto, Rachmat, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Solahudin, 2013, 'Rumus Penanganan Papua', diakses pada tanggal 09 Juni 2013, dari:
<http://www.jurnalparlemen.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=3123>
- KBRI Canberra, 'Indoesian Embassy & Consulate Meeting with papuan community', diakses dari:
<http://www.kemlu.go.id/canberra/Lists/PressRelease/DispForm.aspx?ID=19ContentTypeId=0x01002366E7C516E47342BDE6FBB1080B3DE2>
- Detik.com, 'pengacara tokoh pembebasan papua barat Benny Wenda disekreditkan Indonesia', diakses dari:
<http://news.detik.com/read/2013/05/13/081605/2243794/10/pengacara-tokoh-pembebasan-papua-barat-benny-wenda-diskreditkan-indonesia?nd771104bcj>
- Detik.com, 'Benny Wenda tokoh Pembebasan Papua Barat muncul berpidato di Australia', diakses dari:
<http://news.detik.com/read/2013/05/13/073839/2243771/10/benny-wenda-tokoh-pembebasan-papua-barat-muncul-berpidato-di-australia?nd771104bcj>
- Tempo.com, 'Dubes RI Kritik Media Australia Soal Papua', diakses dari:
<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/20/078481881/Dubes-RI-Kritik-Media-Australia-soal-Papua>